

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yakni Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Penulis mengetahui gambaran umum Kota Samarinda dengan memperoleh data di lapangan melalui observasi dan dokumentasi terkait Kebijakan Aspirasi Dalam Upaya Merawat Konstituen pada Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Aspirasi Hetifah di Kota Samarinda. Dengan demikian, penulis menyajikan beberapa data yang telah diperoleh dari lapangan yakni keadaan sosial, ekonomi, dan pendidikan di Kota Samarinda, serta beberapa data terkait Beasiswa Aspirasi Hetifah.

#### **2.1 Daerah Pemilihan Kalimantan Timur**

Daerah Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Timur merupakan daerah pemilihan dengan alokasi delapan kursi DPR RI yang meliputi beberapa wilayah administratif, antara lain Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Paser.

##### **2.1.2 Profil Kota Samarinda**

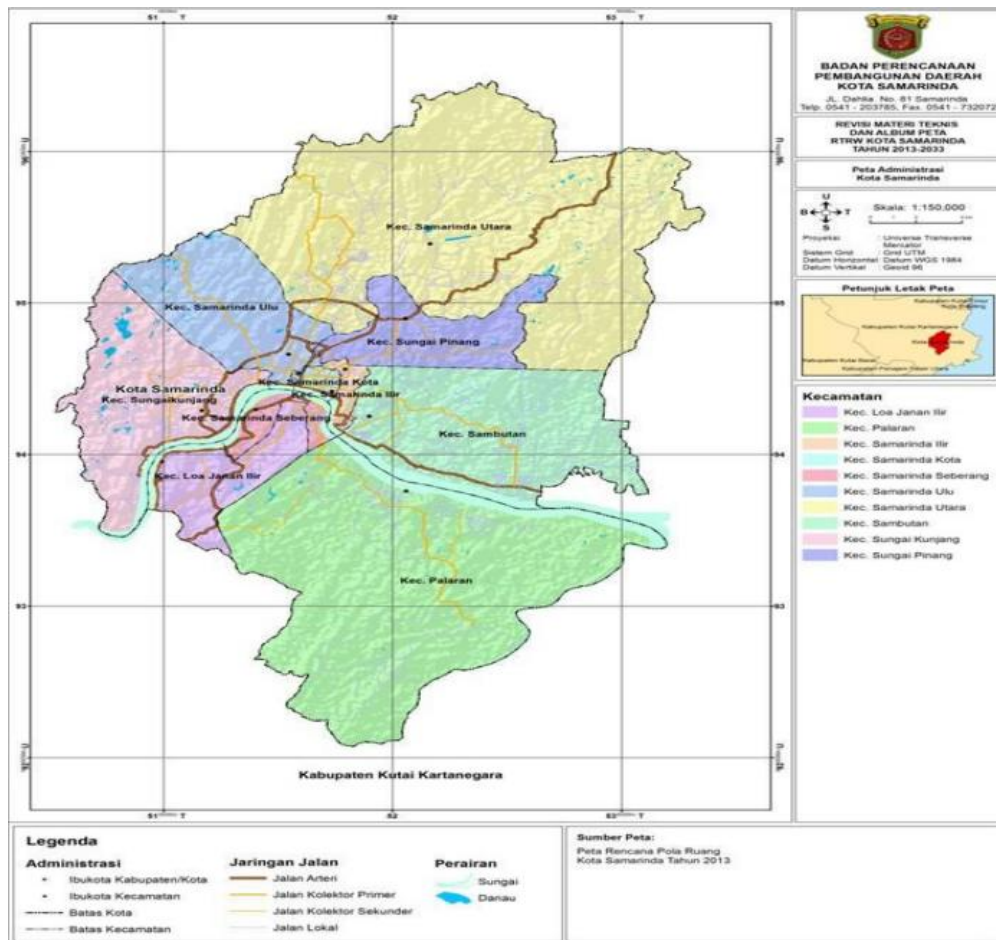
Penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada Kota Samarinda yang termasuk salah satu wilayah dalam Daerah Pemilihan DPR RI Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokus penelitian. Kota Samarinda dipilih karena memiliki posisi

strategis sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus pusat pemerintahan, ekonomi, dan aktivitas sosial-politik di tingkat provinsi.

a. Letak Geografis dan Administrasi

Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda terletak di antara 0°19'02" Lintang Selatan dan 117°18'14" Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, wilayah Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara 27,32°C dan rata-rata curah hujan sebesar 178,96 milimeter. Kota Samarinda memiliki luas wilayah 718 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 10 kecamatan, 59 kelurahan, dan 1.975 rukun tetangga. Adapun batas administrasi Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Muara Badak (Kutai Kartanegara)
2. Sebelah Timur: Kecamatan Anggana dan Sanga-Sanga (Kutai Kartanegara)
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Loa Janan (Kutai Kartanegara)
4. Sebelah Barat: Kecamatan Muara Badak Tenggara Seberang (Kutai Kartanegara) (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2025).



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Samarinda

Sumber: Buku Induk Statistik Sektorial Kota Samarinda (2020)

## b. Kondisi Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari Statistik Daerah Kota Samarinda 2025, jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 865.310 jiwa yang di dominasi oleh kaum laki-laki sebesar 439.040 jiwa dan perempuan sebesar 426.270 jiwa. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2025 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,00. Dari jumlah penduduk Kota Samarinda pada tahun 2025.

Tabel 2.1 Statistik Kependudukan Kota Samarinda 2024-2025

Uraian	Satuan	2024	2025
Jumlah Penduduk	jiwa	858.079	865.310
Laki-laki	jiwa	435.899	439.040
Perempuan	jiwa	422.180	426.270
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,88	0,84
Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	1.195,10	1.205
Rasio Jenis Kelamin		103,25	103,00
Rasio Ketergantungan		40,78	40,88
Proporsi Penduduk Menurut Kelompok Umur			
0 – 14 Tahun	persen	23,05	22,75
16 – 64 Tahun	persen	71,03	70,98
65 Tahun Keatas	persen	5,92	6,27

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda (2025)

Angka kemiskinan pada tahun 2025 di Kota Samarinda tercatat sebesar 3,45 persen (30,45 jiwa) sebesar 909.746 Rupiah/Kapita/Bulan yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat sebesar 4,30 persen (37,8 ribu jiwa) sebesar 877.945 Rupiah/Kapita/Bulan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Samarinda 2022-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2021	750.055 jiwa
2022	784.198 jiwa
2023	850.842 jiwa
2024	877.945 jiwa
2025	909.746 jiwa

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda (2025)

### c. Kondisi Ekonomi

Realisasi Pendapatan Daerah Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 5,10 triliun rupiah yang didominasi oleh Pendapatan Transfer 80,64 persen atau sebesar

4.108,98 Miliar Rupiah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 18,29 persen atau sebesar 931,72 Miliar Rupiah dan untuk 54,78 Miliar rupiah merupakan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sementara untuk realisasi belanja Pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2024 mencapai 5,33 triliun rupiah.

Penduduk usia kerja (15 tahun keatas) terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja di Kota Samarinda pada tahun 2024 sebanyak 434.821 orang, sedangkan 228.983 orang lainnya merupakan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja, dengan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,50 persen. Sedangkan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,75 pesen di tahun 2024 yang mengalami penurunan pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Samarinda Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama	Jumlah (%)
Berusaha sendiri	21,59
Buruh/karyawan/pegawai	58,32
Pekerja keluarga/tak dibayar	7,49
Berusaha dibantu buruh	8,95
Pekerja bebas	3,65
Total	100

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda (2025)

#### e. Kondisi Pendidikan

Angka Melek Huruf (AMH) menjadi indikator dasar untuk mengukur kemampuan penduduk usia 15 tahun keatas dalam membaca dan menulis. Pada Tahun 2024 AMH Kota Samarinda sebesar 98,74 persen yang menunjukkan belum

seluruh penduduk kota Samarinda usia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Samarinda pada tahun 2024 sebesar 10,95 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kota Samarinda mampu menempuh pendidikan selama 11 tahun atau sampai kelas 2 SMA/SMK/MA, meskipun belum mencapai target wajib belajar 12 tahun namun angka ini menunjukkan bahwa selama 7 tahun terakhir rata-rata lama sekolah di Kota Samarinda terus mengalami kenaikan (Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2025).

Pendidikan juga dapat diukur melalui Tingkat Partisipasi Sekolah (APS) untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur, serta Tingkat Partisipasi Murni (APM) yang menggambarkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu sesuai jenjang pendidikannya.

Tabel 2.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan Kota Samarinda 2024-2025

No	Jenjang Pendidikan	2024	2025	Satuan
1.	SD/Sederajat	98,10	96,62	%
2.	SMP/Sederajat	84,71	83,12	%
3.	SMA/Sederajat	78,78	71,91	%

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda, 2025

Tabel 2.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan Kota Samarinda 2024-2025

No	Kelompok Umur	2024	2025	Satuan
1.	7 – 12 Tahun	99,71	99,73	%
2.	13 – 15 Tahun	97,52	96,11	%
3.	16 – 18 Tahun	88,46	87,63	%

Sumber: Statistik Daerah Kota Samarinda 2025

## 2.2 Beasiswa aspirasi

### 2.2.1 Latar Belakang Program Beasiswa KIP-K Aspirasi Hetifah

Mengacu pada Persesjen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang disingkat Program KIP Kuliah merupakan bagian atau skema dari Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah (Persesjen Kemendikbudristek Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, 2022). Terdapat dua jalur usulan KIP Kuliah, yaitu jalur reguler yang dialokasikan langsung dari Kemendikbud kepada Perguruan Tinggi, dan jalur aspirasi atau pemangku masyarakat yaitu kuota yang dialokasikan melalui aspirasi pemangku masyarakat/anggota DPR RI. Beasiswa KIP-K Aspirasi di Kota Samarinda di Salurkan oleh Hetifah Saifudian.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. Merupakan politisi dari Partai Golongan Karya, terpilih pertama kali pada tahun 2009 menjadi anggota DPR RI Daerah

Pemilihan Kalimantan Timur periode (2009-2014) menempati kursi di komisi II DPR RI. Hetifah kembali terpilih pada periode keempatnya (2025-2029) sebagai Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, sains, teknologi, pemuda dan olahraga, literasi, reset dan inovasi serta statistik. Pada bidang pendidikan dan beasiswa, hetifah aktif dalam mensosialisasikan dan menyalurkan program beasiswa dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Indonesia, terutama di daerah pedalaman khususnya daerah pemilihannya di Provinsi Kalimantan Timur dengan program beasiswa KIP Kuliah Aspirasi (*Hetifah Sjaifudian, n.d.*).

### **2.2.2 Tujuan dan Sasaran Program**

1. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi
2. Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik dan non akademik
3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa
4. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat yang kuliah di Perguruan Tinggi

Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran pemegang KIP SMA, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Wilayah Papua, 3T, dan anak TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus.

### 2.2.3 Mekanisme dan Bentuk Bantuan

Pada umumnya KIP Kuliah Aspirasi Hetifah dan Reguler sama, yang membedakan hanya terletak mekanisme usulan program

- a. Mekanisme seleksi atau tata cara pendaftaran KIP Kuliah Aspirasi Hetifah
  1. Pelamar mendaftar di website Kemendiktisaintek (<https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/>) untuk mendapatkan nomor registrasi KIP.
  2. Pelamar mendaftar melalui kampus dan mandiri di link yang telah disediakan oleh tim Hetifah Scholarship Association
  3. Peserta mendapatkan undangan untuk melakukan seleksi wawancara sesuai domisili peserta/pilihan peserta
  4. Peserta melakukan wawancara dengan Tim Seleksi dari Hetifah Scholarship Association
  5. Pengumuman lolos atau tidaknya beasiswa
- b. Bentuk Bantuan KIP Kuliah Aspirasi Hetifah

Komponen pembiayaan atau bentuk bantuan KIP Kuliah Reguler dan Aspirasi Hetifah sama, terdiri dari dua komponen pembiayaan, yaitu terdiri dari biaya kuliah yang besaran untuk prodi akreditasi A maksimal Rp12.000.000,00 khusus untuk prodi bidang kedokteran dan maksimal Rp8.000.000,00 untuk prodi non kedokteran. Untuk akreditasi B maksimal sebesar Rp4.000.000,00 dan akreditasi C maksimal sebesar Rp2.400.000,00. Sedangkan untuk biaya hidup dibedakan berdasarkan klaster dari BPS. Terbagi dalam lima klaster wilayah, yaitu Rp800.000,00,

Rp950.000,00, Rp1.100.000,00, Rp1.250.000,00, dan Rp1.400.000,00 per bulan. Daerah Kalimantan Timur rata-rata berada di klaster Rp800.000,00 hingga Rp1.100.000,00 per bulan. Bantuan biaya hidup sepenuhnya merupakan hak mahasiswa, sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima untuk memenuhi berbagai kebutuhan selama kuliah. Dengan adanya bantuan pendidikan ini, perguruan tinggi tidak boleh meminta biaya tambahan apapun terkait operasional pendidikan ataupun terkait dengan proses pembelajaran (Kemendiktisaintek, 2025).

#### **2.2.4 Representasi Kebutuhan Konstituen**

Konstituen adalah warga negara atau pemilih di daerah pemilihan yang memberikan mandat politik kepada anggota DPR untuk mewakili kepentingan mereka. Dalam sistem demokrasi perwakilan, hubungan antara legislator dan konstituen merupakan relasi representatif yang menuntut akuntabilitas dan responsivitas, bukan sekadar hubungan elektoral. Secara normatif, kewajiban anggota DPR dalam merepresentasikan kebutuhan konstituen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 81 huruf i mewajibkan anggota DPR untuk bertemu secara rutin dengan konstituennya pada setiap masa reses dan melaporkan hasilnya kepada partai politik melalui fraksi di DPR. Selanjutnya, Pasal 81 huruf k menegaskan kewajiban pertanggungjawaban moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya melalui perjuangan politik yang berkaitan dengan aspirasi konstituen.